



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tareran

Evangelisti Kawatu^a, Jenny Nancy Kaligis^b, Andrew Patrik Marunduh^c

^{a,b,c} Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia.

Email: kevanglisti@gmail.com^a, jennykaligis@unima.ac.id^b,
andrewmarunduh@unima.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 01-07-2026

Revised 12-10-2026

Accepted 15-10-2026

Kata Kunci:

Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintah,
Kompetensi Sumber
Daya Manusia,
Akuntabilitas
Pengelolaan Dana
Desa

Keywords:

*Implementation of
Government
Accounting Standards,
Human Resource
Competence,
Accountability of
Village Fund
Management*

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah serta kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Studi ini dilaksanakan di 13 desa Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Variabel yang diteliti mencakup penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis yang dipakai yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Namun secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan.

A B S T R A C T

This study aims to measure the influence of the implementation of government accounting standards and human resource competence on the accountability of village fund management. The study was conducted in 13 villages within Tareran District, South Minahasa Regency. This is a causal study employing a quantitative research approach. Variabel yang diteliti mencakup penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Primary data were collected through questionnaires. Data analysis was performed using multiple linear regression with the aid of SPSS version 25.0. The results indicate that, when analyzed individually, the implementation of government accounting standards has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. Conversely, human resource competence has a positive but insignificant effect on the accountability of village fund management. However, when analyzed simultaneously, the implementation of government accounting standards and human resource competence have a positive and significant effect on the accountability of village fund management in the villages of Tareran District, South Minahasa Regency.

PENDAHULUAN

Sektor publik menjadi landasan utama dalam pengelolaan negara dan layanan publik, serta memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas publik menuntut adanya pelaporan yang transparan mengenai semua sumber daya yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi (Sam et al., 2024). Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan RI, pencairan Dana Desa sejak 2020 hingga Juli 2025 telah melebihi Rp 40,34 triliun. Besarnya alokasi dana ini menuntut agar pemerintah desa mengelola keuangannya secara profesional, efektif, efisien, dan terutama transparan (Permatasari et al., 2021). Pemerintah kota atau kabupaten wajib menyiapkan laporan keuangan yang menunjukkan transparansi penggunaan dana desa. Laporan tersebut harus dibuat mengikuti prinsip-prinsip standar akuntansi, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), meski dengan penyesuaian atau penyederhanaan yang cocok dengan skala dan kompleksitas pemerintah daerah (Imalia et al., 2023).

Secara umum, neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Badan Publik merupakan dokumen terstruktur yang menampilkan posisi keuangan suatu entitas publik beserta seluruh transaksi-nya. Khususnya, Neraca Daerah (BPR) dimaksudkan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pemakaian anggaran dan sumber daya daerah. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan semua pihak yang berkepentingan, mulai dari warga, anggota dewan kota, hingga pemerintah pusat. Agar neraca ini dapat berfungsi secara optimal, standar akuntansi publik menekankan bahwa BPR harus memiliki kualitas tinggi yaitu relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan (Imalia et al., 2023).

Penerapan standar akuntansi pemerintah bersama dengan kompetensi sumber daya berperan krusial dalam menentukan mutu laporan keuangan. Teori akuntabilitas mengungkapkan adanya hubungan erat antara kepuasan dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi mencerminkan upaya memaksimalkan nilai bagi klien dan manajemen (Ramdan et al., 2021).

Kecamatan Tareran, sebagai bagian dari Kabupaten Minahasa Selatan, memperoleh dana DD dari pemerintah pusat dan mencakup 13 desa yang akan menikmati manfaat tersebut. Data mengenai anggaran Dana Desa untuk Kecamatan Tareran pada tahun 2025 adalah:

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Tahun 2025

Nama Desa	Alokasi Kinerja (Rp)
Pinamorongan	206.808.000
Kaneyan	-
Koreng	-

Tumaluntung	-
Rumoong Atas	206.808.000
Lansot	-
Wiau Lapi	206.808.000
Wuwuk	-
Rumoong Atas Dua	-
Lansot Timur	-
Wuwuk Barat	-
Tumaluntung Satu	-
Wiau Lapi Barat	-

Sumber: (Nonutu, 2025)

Berdasarkan alokasi anggaran dana pemerintah daerah tahun 2025, hanya tiga desa yang memperoleh alokasi kinerja karena telah mencapai target tertentu, memperlihatkan bahwa banyak desa masih terdampak oleh pengelolaan dana yang tidak optimal. Hal ini terjadi karena pengelolaan dana desa di sejumlah desa Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, terganggu oleh manajemen yang kurang tepat. Kegagalan penyaluran dana alokasi kinerja ke desa-desa disebabkan oleh keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kurangnya penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat menghalangi warga desa untuk memahami secara jelas kebijakan pengelolaan dana pemerintah daerah. Penyebab utama yang ditemukan adalah keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di antara aparatur desa. Minimnya pemahaman dalam laporan keuangan serta keterampilan teknis yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang rumit, yang pada akhirnya menyulitkan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan desa, meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan, serta menyebabkan pelaporan yang dilakukan tidak tepat waktu dan akurat.

Penelitian dari Makalag et al. (2023), Oktavia (2022) dan Wahyuningsih et al. (2026) secara spesifik menegaskan bahwa Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan serta pengelolaan dana desa. Sementara itu, penelitian oleh Novera (2022), Nurhaeda & Solatiah (2024) dan Tasari et al. (2023) menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Maukar, Moroki, dan Kantohe, 2025) secara khusus menelaah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Mereka menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, serta akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dari laporan akuntabilitas desa yang mencakup tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Studi ini secara khusus mempelajari desa-desa di Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terfokus. Pemilihan wilayah tersebut tidak kebetulan, melainkan didasari oleh temuan awal tentang masalah pelaporan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tareran, seperti keterlambatan laporan dan kurangnya informasi keuangan yang jelas bagi warga. Dengan mempersempit wilayah penelitian dan menilai kembali pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta Kompetensi Sumber Daya Manusia di daerah yang sudah diketahui memiliki masalah pelaporan. Adapun tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori Agensi memberikan dasar untuk memahami interaksi antara prinsipal dan agen. Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada sektor publik, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang mempercayakan pemerintah desa sebagai agen untuk mengelola sumber daya, terutama Dana Desa. Hubungan saling percaya ini mengharuskan pemerintah desa untuk beroperasi demi kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Hubungan ini juga menunjukkan pentingnya kepuasan terhadap hasil yang diperoleh organisasi, di mana terdapat upaya untuk memaksimalkan keuntungan bagi prinsipal (Ramdan et al., 2021).

Konsep Dasar Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah dana yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kabupaten/kota yang dialokasikan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pengembangan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Wahyuni & Darmawan Sriyanto, 2023).

Pengelolaan dana desa

Pengelolaan merupakan suatu proses yang mencakup fungsi-fungsi seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tanggung jawab (Selvi & Patra, 2025). Untuk mencapai pengelolaan yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan dengan disiplin anggaran yang rapi (Cahyati & Nila, 2021).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban dari penyedia yang mengorganisir kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab semua yang berkaitan dengan langkah-langkah dari setiap keputusan dan proses yang diambil, serta bertanggung jawab atas hasil dan kinerja yang dicapai (Selvi & Patra, 2025).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Supadmi dan Suputra, pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tentang tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Hal ini harus dilakukan mengikuti prosedur, kebijakan serta peraturan yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan desa (Cahyati & Nila, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah. SAP berfungsi sebagai pedoman bagi entitas pelaporan keuangan di sektor publik agar dapat mempertanggungjawabkan kinerja keuangan pemerintah kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan yang ada (Rachmawati & Anik, 2020). Dengan menerapkan SAP, laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik, lebih relevan, lebih andal, dan lebih mudah dipahami (Zai, 2024). Dasar hukum utama SAP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Putri & Antoni, 2024).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, yang lebih dikenal dengan singkatan SDM, merujuk kepada individu yang berkontribusi secara produktif dalam menggerakkan organisasi, baik di lembaga maupun di perusahaan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan SDM yang memiliki kompetensi serta pemahaman mengenai aturan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Jalil, 2021). Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada kapasitas individu untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diberikan, dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai (Pulungan, 2022).

Hipotesis

- H1: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- H2: Kompetensi sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- H3: Penerapan standar akuntansi pemerintah dan berpengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa-desa yang ada di kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini terdiri dari Variabel yang diteliti mencakup penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur desa yang ada di 13 desa, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana jumlah seluruh aparatur desa berjumlah 104 aparatur desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu sampling sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2023), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai

sampel. Sampel jenuh disebut juga sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Peneliti memilih sampel jenuh, karena tidak ada populasi yang diabaikan, sehingga semua data penting bisa diteliti secara utuh.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari responden yaitu metode survei dengan menggunakan kuesioner. Untuk memperoleh data yang lebih akurat kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat responden di setiap Desa Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 25 untuk mengolah data. Pada penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, uji t (parsial), Uji F (simultan), serta uji koefisien determinasi (R^2).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada aparatur desa di Kecamatan Tareran sebagai objek kajian utama. Kecamatan Tareran memiliki 13 desa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan proses pengumpulan data, diperoleh 104 responden yang mengembalikan kuesioner.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,61878582
Most Extreme Differences	Absolute	0,065
	Positive	0,065
	Negative	-0,063
Test Statistic		-0,063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Kuesioner yang diolah dan SPSS 25

Pada tabel 7, Test Asymp. Sig. (2-tailed), yang menampilkan nilai .200 (0,200) lebih besar dari 0,05 oleh karena itu, prasyarat distribusi normal telah terpenuhi dengan kuat berdasarkan uji statistik ini.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

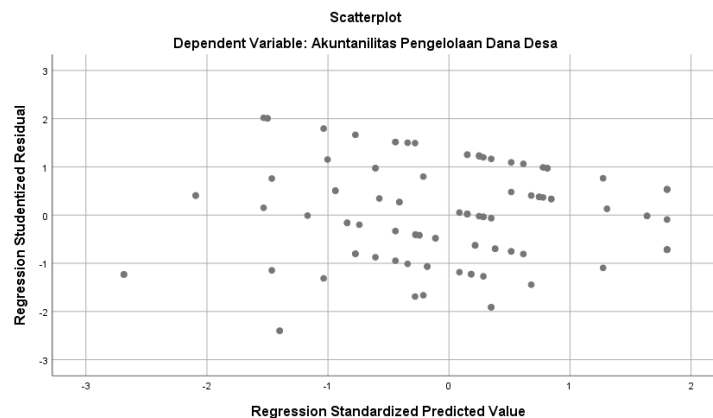
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model			
1	(Constant)		
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,833	1,201
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,833	1,201

Sumber: Data Kuesioner yang diolah dan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa nilai Tolerance 0,833 lebih tinggi dari 0,10 dan VIF hanya 1,201 jauh di bawah batas maksimum 10. Ini berarti variabel Penerapan Standar Akuntansi (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki jalur masing-masing tanpa saling memengaruhi secara negatif.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Kuesioner yang diolah dan SPSS 25

Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plot

Pada grafik tersebut, titik-titik terdistribusi secara acak, tidak membentuk pola khusus, serta berada di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y, sehingga model regresi dapat dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	14,919	1,861		8,015	0,000	
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,142	0,047	0,304	3,048	0,003	0,833 1,201
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,119	0,069	0,171	1,712	0,090	0,833 1,201

Sumber: Data Kuesioner yang diolah dan SPSS 25

Berdasarkan persamaan, penjelasan-nya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Nilai variabel Standar Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berada pada nol (Constant), maka tingkat Akuntabilitas Dana Desa (Y) memiliki nilai dasar sebesar 14,919.
2. Nilai koefisien Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) 0,142,

menunjukkan efek positif. Setiap peningkatan 1 poin pada (X1) meningkatkan (Y) sebesar 0,142.

3. Nilai koefisien pada Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) 0,119, serupa dengan yang sebelumnya, mengindikasikan bahwa kenaikan 1 poin pada X2 akan menaikkan Y sebesar 0,119.

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan-nya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, nilai signifikan yang diperoleh adalah $0,003 < 0,05$ dan nilai t Hitung $3,048 > t$ Tabel $1,659$, sehingga hipotesis H_1 dapat diterima; Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Sedangkan untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), meskipun koefisien positif $0,139$ serta nilai t -Hitung $1,712 > t$ -Tabel $1,659$ namun, nilai signifikan yang tercatat adalah $0,090$ yang melebihi $0,05$, maka hipotesis H_2 ditolak; Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 4 Hasil F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52,928	2	26,464	9,903	.000 ^b
	Residual	269,908	101	2,672		
	Total	322,837	103			

Sumber: Data Kuesioner yang diolah dan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4 yang menampilkan hasil Uji F, nilai signifikan yang diperoleh sebesar $0,000$, jauh di bawah batas minimum $0,05$ dan F -Hitung $9,903$ yang lebih besar dari F -Tabel $3,08$ maka hipotesis H_3 diterima; Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.405 ^a	0,164	0,147	1,63473

Sumber: Data Kuesioner yang diolah dan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.13, nilai Adjusted R-Square sebesar $0,147$ menunjukkan bahwa gabungan variabel antara Penerapan Standar Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia hanya mampu menjelaskan sekitar $14,7\%$ berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sebanyak $85,3\%$ sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena hal ini, selaras dengan teori agen di mana aparat desa berperan sebagai agen yang harus melapor kepada prinsipal melalui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa. Untuk menunaikan kewajiban tersebut, aparat desa harus dapat menyajikan pengelolaan dana desa yang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi sebelumnya oleh Makalag et al. (2023) yang meneliti pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Karena penelitian Makalag et al. (2023) juga menunjukkan bahwa hipotesis penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa pada Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Bila dikaitkan dengan teori agen, menawarkan perspektif menarik. Dalam kerangka teori tersebut, perangkat desa (sebagai agen) diharapkan memiliki kapasitas dan kemampuan memadai untuk melaksanakan mandat yang diberikan oleh masyarakat (sebagai prinsipal). Namun, hasil penelitian dalam konteks analisis terhadap teori agen memperlihatkan bahwa hanya memiliki kompetensi atau kecerdasan tidak menjamin tercapai-nya transparansi. Mungkin saja perangkat desa memang kompeten secara teknis, namun adanya celah dalam kontrak atau hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa membuat kompetensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi sebelumnya oleh Yunni et al. (2022) yang meneliti Pengaruh Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-desa di Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dalam kerangka Teori Agen, konflik sering muncul akibat ketidak seimbang informasi situasi di mana perangkat desa memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang keuangan dibandingkan masyarakat. Standar Akuntansi Pemerintah berperan sebagai panduan agar laporan keuangan tidak di manipulasi, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia memastikan panduan tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan

secara tepat oleh perangkat desa. Secara konseptual, ketika perangkat desa (Agen) dilengkapi dengan kompetensi yang memadai dan diwajibkan mematuhi standar akuntansi yang ketat, ruang bagi tindakan yang merugikan masyarakat seperti korupsi atau laporan fiktif akan sangat terbatas. Dengan demikian, akuntabilitas dana desa dapat tercapai secara optimal bila sistem yang efektif bertemu dengan tenaga ahli yang kompeten. Kombinasi ini berhasil menekan kepentingan pribadi agen demi kepentingan bersama prinsipal.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena hal ini, selaras dengan teori agen di mana aparat desa berperan sebagai agen yang harus melapor kepada prinsipal melalui pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.
2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian dalam konteks analisis terhadap teori agen memperlihatkan bahwa hanya memiliki kompetensi atau kecerdasan tidak menjamin tercapai-nya transparansi. Mungkin saja perangkat desa memang kompeten secara teknis, namun adanya celah dalam kontrak atau hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa membuat kompetensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
3. Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam kerangka Teori Agen, konflik sering muncul akibat ketidak seimbang informasi situasi di mana perangkat desa memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang keuangan dibandingkan masyarakat. Diperlukan kombinasi antara Standar Akuntansi Pemerintah sebagai sistem kontrol dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya penelitian hanya meneliti di desa Kecamatan Tareran, sehingga tidak mencakup desa lainnya atau sektor lain. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga belum mencakup faktor lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain, seperti pengaruh sistem pengawasan internal atau budaya organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Bagi pemerintah desa di Tareran untuk segera mengambil langkah strategis dalam meningkatkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan serta memperkuat kompetensi Sumber Daya Manusia. Pertama, Pemerintah Desa disarankan untuk mengadakan pelatihan secara berkala dan terarah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kedua, penting bagi pemerintah desa bersama pemerintah kecamatan untuk memperketat sistem pengawasan dan membangun transparansi informasi secara langsung kepada masyarakat desa guna meminimalkan risiko keterlambatan laporan finansial.
2. Penelitian Selanjutnya, karena penelitian ini hanya menelaah Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor lain, seperti pengaruh sistem pengawasan internal atau budaya organisasi terhadap akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyati, A., & Nila. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Se-Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan). 167–186. <https://eprints.umpo.ac.id/6634/>
- Imalia, M., Aziz, I., & Rachma, N. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng (BPKD). *Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 65–75. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/3658/1855>
- Jalil, M. M. F. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Transparansi Sebagai Pemoderasi. *Universitas Negeri Alaudin Makassar*, 1(69), 1–116. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20565/>
- Makalag, F. N., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 11(1), 1308–1318.
- Maukar, D. S., Moroki, F. O., & Kantohe, M. (2025). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kolongan Tetempangan Tahun 2023). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 190–200. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/201>
- Nonutu, V. (2025). Daftar Rincian Dana Desa 2025 di Kecamatan Tareran Minahasa

- Selatan, Desa Pinamorongan Terbanyak. 2–5.
<https://manado.tribunnews.com/2025/01/07/daftar-rincian-dana-desa-2025-di-kecamatan-tareran-minahasa-selatan-desa-pinamorongan-terbanyak>
- Novera, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusi, Pertisipasi Penganggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. <https://repository.uir.ac.id/16695/>
- Nurhaeda, A., & Solatiah, B. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Enrekang. *I(3)*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.468>
- Oktavia, Y. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. <https://repository.unpkediri.ac.id/7719/>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). *The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. Sustainability (Switzerland)*, *13*(21).
<https://doi.org/doi.org/10.3390/su132112294>
- Pulungan, M. (2022). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kabupaten Padang Lawas). *8.5.2017*, 2003–2005.
<https://repository.uinsu.ac.id/15174/>
- Putri, F. C., & Antoni, E. (2024). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik* (Efitra (ed.)). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
https://www.researchgate.net/publication/378235908_BUKU_AJAR_AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK
- Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah , Good Governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 1389–1407.
<https://www.lppm-unissula.com>
- Ramdan, P., Prayoga, C. J., & Mulyani, F. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, *6*(1), 39–53.
<https://doi.org/10.25134/jrka.v6i1.4376>
- Sam, A. A. R., Haliah, & Kusumawati, A. (2024). Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, *3*(1), 228–241.

<https://doi.org/10.55227/ijerfa.v3i1.245>

Selvi, & Patra, A. D. A. (2025). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerinta Terhadap Akuntabikitas Laporan Keuangan. *Jurnal Keuangan Publik Islam*, 6(1), 14–28. <http://repository.umpalopo.ac.id/324/>

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. <https://doi.org/https://share.google/H03LBR7S0annYnCPc>

Wahyuni, S., & Darmawan Sriyanto, Ma. (2023). Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat PT Inovasi Pratama Internasional. 1–64. <https://ipinternasional.com/wp-content/uploads/2023/02/Full-Book-Monograf-Sri-Wahyuni-Pengelolaan-Dana-Desa-Demi-Kesejahteraan-Masyarakat.pdf>

Yunni, Azlina, N., & Nurulita, S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Komitmen Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa-desanya di Kabupaten Kepulauan Meranti). *Terbuka Journal of Economics and Business*, 2019(3(2)), 1–10. <https://doi.org/10.33830/tjeb.v3i2.3738>

Zai, E. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide’u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. <https://lppm2.unias.ac.id/assets/files/turnitin/2024/25EOER0b76c7224ac5f150a4bb2220a88ceda4.pdf>